BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan gagasan yang menegaskan bahwa kekuasaan dalam pemerintahan bersumber dari kehendak rakyat. Dalam sistem negara demokratis, rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Kedaulatan ini bisa mencakup berbagai aspek, termasuk politik dan ekonomi. Jika berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan di bidang politik, sistem tersebut dikenal sebagai demokrasi politik. Sementara itu, jika berkaitan dengan pengelolaan perekonomian, istilah yang digunakan adalah demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi diwujudkan melalui partisipasi aktif seluruh masyarakat, di mana manfaat dari kegiatan ekonomi dinikmati secara merata oleh semua anggota masyarakat, sementara proses pelaksanaannya diawasi oleh mereka sendiri.¹ Perekonomian nasional dalam sistem ini diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesatuan nasional.²

Demokrasi ekonomi di Indonesia menganut prinsip kolektivisme atau kebersamaan, yang menempatkan kepentingan masyarakat di atas

¹ M. Wildan Humaidi, *Konstitusionalitas Demokrasi Ekonomi*, (Malang : Intrans Publishing, 2019), 55.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta : Kompas, 2010), 353-354.

segalanya. Melalui sistem ini, masyarakat terlibat secara aktif dan bergotong royong dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dijalankan sebagai usaha bersama yang berlandaskan semangat kekeluargaan, dengan pemerintah turut berperan dalam pengaturannya.³

Jimly Asshiddiqie seorang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia dan ahli hukum tata negara merupakan salah satu intelektual yang memiliki pandangan mendalam tentang demokrasi ekonomi. Menurut beliau demokrasi ekonomi adalah konsep yang menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses ekonomi, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kemudian kekuasaan tertinggi di Indonesia, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi yang telah diterapkan, seluruh sumber daya di bidang politik dan ekonomi berada di bawah kendali rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Meski demikian, tidak semua pengelolaan dilakukan secara langsung oleh rakyat, sebab beberapa aspek penting dari penguasaan tersebut didelegasikan kepada negara untuk dikelola.⁴

Meskipun dalam praktiknya rakyat yang berdaulat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada para wakil, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, hal ini tidak mengurangi makna kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi politik dan ekonomi. Kedaulatan rakyat tetap tidak bisa dianggap berkurang hanya

³ Ali Murtadho, "Demokrasi Ekonomi dan Kontribusi Ekonomi Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945", *Walisongo : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 1, (Mei 2016), 148.

⁴ Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, 353.

karena adanya pelimpahan wewenang kepada para pejabat negara. Dalam konteks kehidupan bernegara, kedaulatan rakyat bersifat relatif mutlak, meskipun harus dipahami dalam batasan tertentu, sebagai bentuk pengakuan atas kekuasaan tertinggi milik Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari keimanan bangsa Indonesia kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, setiap individu dipandang sebagai khalifah di muka bumi, yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya kehidupan demi kemakmuran bersama, berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.⁵

Jadi konsep demokrasi ekonomi mencakup upaya untuk mengurangi monopoli dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, serta memastikan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi. Dalam karya tulisnya Jimly menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dalam bidang ekonomi untuk mencapai keadilan sosial yang sejati.

Penerapan strategi pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip demokrasi ekonomi, di mana proses produksi dilakukan oleh semua pihak, demi kepentingan bersama, serta berada di bawah pengawasan dan kepemimpinan masyarakat itu sendiri. Dalam sistem ini, kesejahteraan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Oleh sebab itu, keberadaan kemiskinan dianggap tidak dapat diterima, sehingga setiap kebijakan maupun program pembangunan harus dirancang agar memberikan

⁵ Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, 354.

manfaat khusus bagi masyarakat yang paling miskin dan kurang beruntung. Konsep inilah yang menjadi inti dari pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya memperhatikan kesejahteraan generasi saat ini, tetapi juga melindungi dan menjamin hak-hak sosial kelompok masyarakat yang miskin dan terpinggirkan untuk masa depan.⁶

Dalam proses pembangunan ekonomi, penting untuk menghindari penerapan paham neoliberalisme maupun etatisme, karena kedua paham tersebut berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merugikan antar pelaku ekonomi. Oleh karena itu, GBHN menegaskan pentingnya keberpihakan pada pemberdayaan ekonomi rakyat, yang diwujudkan melalui percepatan pengembangan koperasi dan usaha kecil sebagai sarana utama bagi aktivitas ekonomi masyarakat luas.⁷

Demokrasi ekonomi menolak keberadaan sistem ekonomi yang bercorak liberalisme, etatisme, serta praktik pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau monopoli. Liberalisme dalam bidang ekonomi perlu dihindari karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan penindasan antar sesama manusia. Di sisi lain, sistem etatisme, di mana seluruh kegiatan ekonomi dikendalikan sepenuhnya oleh negara, juga tidak

⁶ Nurullah, "Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi Indonesia", *Hikamuna*. 1, (2016), 23.

⁷ Aji Sofyan Effendi, "Pengaruh Demokrasi Ekonomi Dan Derajat Penghisapan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia", *Disertasi Doktor* (Makasar : Universitas Hasanuddin Makasar, 2013), 161.

dianjurkan karena dapat menghambat pertumbuhan berbagai sektor usaha di luar kendali negara, seperti koperasi, usaha kecil, dan swasta.⁸

Kemudian kondisi demokrasi ekonomi di Indonesia saat ini masih kompleks dan terbatas mulai dari pemerintah yang sering kali membuat keputusan ekonomi tanpa melibatkan partisipasi publik secara signifikan, sehingga keberlanjutan demokrasi ekonomi masih jauh dari ideal.⁹ Adanya oposisi dari masyarakat terhadap kebijakan ekonomi baru, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,¹⁰ menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yakni perpaduan antara mekanisme pasar dan intervensi atau pengaturan oleh negara. Namun demikian, pengaruh sistem pasar perlu dibatasi agar tidak berkembang menjadi liberalisme bebas yang berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap kelompok masyarakat yang lemah dan kurang mampu. Walaupun secara makro perekonomian telah menunjukkan kemajuan dalam mengurangi ketimpangan dan angka kemiskinan, di tingkat lokal masih ditemukan masalah ketidakmerataan dan meningkatnya kemiskinan, terutama akibat dampak dari krisis ekonomi. Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang

⁸ Tarmizi Abbas, Win Konadi Manan, "Keterkaitan antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan", *Mimbar*, 3 (September 2005), 431-432.

⁹ Aini Shalihah, Fawahan, "Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU", *Jurist-Diction*, 2 (2023), 244.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

berjalan secara optimal, dibutuhkan keterpaduan antara sistem politik yang demokratis dengan sistem ekonomi yang adil. Tanpa keseimbangan tersebut, penerapan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi hanya akan menjadi sebuah angan-angan semata.¹¹

Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi ekonomi di Indonesia hingga saat ini masih belum berjalan secara maksimal dan memerlukan upaya reformasi lanjutan guna mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, mengurangi ketimpangan di tingkat lokal, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penerapan demokrasi ekonomi yang adil dan inklusif.

Berdasarkan relevansi konsep demokrasi ekonomi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesetaraan ekonomi, penulis tertarik untuk menganalisis pemikiran Jimly Asshiddiqie mengenai demokrasi ekonomi. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pemikiran beliau dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan efektivitas penerapan demokrasi ekonomi di Indonesia. Dengan hal ini peneliti mengangkat judul sebagai berikut : **ANALISIS PEMIKIRAN JIMLY ASSHIDDIQIE TENTANG KONSEP DEMOKRASI EKONOMI SERTA RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA.**

¹¹ Abbas, “Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan”, 432.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah disampaikan, dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi inti dari permasalahan dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang demokrasi ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi konsep demokrasi ekonomi pemikiran Jimly Asshiddiqie terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang demokrasi ekonomi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep demokrasi ekonomi pemikiran Jimly Asshiddiqie terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi para pembaca. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat, baik dari sisi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi sekaligus memperluas wawasan keilmuan bagi siapa pun yang ingin mendalami pemikiran Jimly Asshiddiqie terkait konsep demokrasi ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Melalui penelitian ini, harapan utama adalah agar ilmu yang diperoleh dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat dan membawa keberkahan dalam kehidupan. Menjadikannya sebuah pengalaman dan pelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan memperoleh wawasan yang lebih baik dari sebelumnya. Terutama dalam memperdalam bacaan dan referensi mengenai demokrasi ekonomi, sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam segi praktek, peneliti bisa menerapkan dan memiliki bekal untuk menjalankannya. Jika tidak demikian berharap peneliti dapat menjadikan ilmu ini dapat berguna baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

b. Masyarakat

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat yang kurang memahami mengenai hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi ekonomi. Hal ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat agar mengetahui lebih jauh pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang demokrasi ekonomi.

c. IAIN Madura

Dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap semoga penelitian ini menjadi tambahan bacaan, referensi dan pandangan yang lebih dalam tentang karya ilmiah di perpustakaan IAIN Madura. Sehingga, dapat dijadikan perbandingan dan acuan

terhadap para mahasiswa yang mmbutuhkannya, untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Penelitian ialah sebuah proses ilmiah untuk mendapatkan data untuk digunakan keperluan penelitian.¹² Studi konseptual ini berbasis pada pemikiran tokoh, yaitu Jimly Asshiddiqie. Peneliti mendeskripsikan beberapa pemikirannya dengan merujuk pada buku konstitusi ekonomi. Selanjutnya, peneliti akan menelaah bagaimana pemikiran-pemikiran tersebut dalam konteks demokrasi ekonomi di Indonesia.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan sumber-sumber lainnya.¹³ Jenis ini cocok untuk menganalisis pemikiran Prof. Jimly Asshiddiqie karena data utamanya adalah karya-karya tertulis beliau dan interpretasi dari pemikirannya.

¹² Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : alfabeta, 2012),5

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan suatu pendekatan penelitian *conceptual approach*. *Conceptual approach* dalam penelitian ini akan berfokus pada kajian konsep-konsep yang beranjak dari pandangan atau pemikiran dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama,¹⁴ yang mendasari pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang demokrasi ekonomi.

3. Data Penelitian dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, terdapat dua data yang digunakan, data itu disebut juga sebagai bahan hukum diantaranya sebagai berikut:¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan jenis data yang menjadi sumber utama dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari buku karya Jimly Asshiddiqie yang berjudul konstitusi ekonomi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data pendukung yang melengkapi bahan hukum primer dan menjelaskan maksud-maksud yang ada dalam bahan hukum sekunder. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel dari internet, catatan sejarah, serta berbagai referensi lain yang berhubungan dengan topik demokrasi ekonomi.

¹⁴ Tim Penyusun, *Panduan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2024), 37.

¹⁵Tim Penyusun, *Panduan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 36.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan sumber hukum primer dan sekunder adalah dengan mengumpulkan beberapa dokumen literatur. Hal ini dilakukan dengan membaca, merangkum dan menganalisis. Dokumen literatur tersebut kemudian dipahami dan ditelaah untuk dapat merangkai suatu penelitian dari awal sampai kesimpulan. Dokumen literatur tersebut harus relevan dengan judul penelitian yang membahas mengenai Analisis Pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang Demokrasi Ekonomi, seperti buku, jurnal, tulisan hasil penelitian, makalah, majalah, artikel internal, website dan sejarah atau catatan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.¹⁶

5. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini metode pengolahan data menggunakan beberapa tahapan guna memperoleh data dengan hasil yang maksimal. Tahap yang pertama yaitu pemeriksaan data (*editing*), hal ini dilakukan dengan memeriksa data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Setelah melalui tahap pemeriksaan maka data-data tersebut menuju pada tahapan kedua yaitu tahap klasifikasi (*classifying*), maksudnya data yang telah diperiksa kemudian dipilah-pilah atau disusun sesuai dengan pengelompokannya. Langkah berikutnya, yang merupakan tahap ketiga, adalah tahap verifikasi (*verifying*), yaitu proses pengecekan ulang terhadap seluruh data yang telah melewati tahapan sebelumnya untuk

¹⁶Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 37.

memastikan keakuratan dan keabsahan data, sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Tahap yang ke empat yaitu tahap analisis (*analysing*), data-data tersebut kemudian dianalisis, diperiksa sehingga memperoleh suatu data atau pemikiran yang baru. Hal ini bertujuan untuk menyajikan data dengan penyampaian yang mudah dimengerti dan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di penelitian ini. Tahap terakhir yaitu tahap kesimpulan (*concluding*), dalam tahapan ini berisi kesimpulan dari semua tahapan sebelumnya yaitu tahap *editing, classifying, verifying dan analysing*.¹⁷

6. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai acuan atau pembanding dalam penyusunan penelitian ini, adapun daftar penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Aini Shalihah dan Lian Fawahan yang berjudul “Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, di dalamnya membahas mengenai penerapan demokrasi ekonomi di Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,

¹⁷Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 37.

yang mengubah Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Peneliti berpendapat bahwa undang-undang tersebut telah gagal menstabilkan demokrasi ekonomi karena adanya penolakan publik dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Mereka menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap dampak undang-undang tersebut dan menyoroti pentingnya keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan, sekaligus membahas implikasi yang lebih luas dari Pasal 33 UUD 1945 terkait pengelolaan sumber daya dan kesejahteraan sosial.¹⁸

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai demokrasi ekonomi di Indonesia. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah bahwa penelitian sebelumnya lebih menyoroti penerapan demokrasi ekonomi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sedangkan penelitian saat ini pembahasannya lebih luas terhadap demokrasi ekonomi pemikiran Jimly Assiddhiqie.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi Abbas, Win Konadi Manan, “Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi kerakyatan” Penelitian ini membahas kaitan antara demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan sistem ekonomi

¹⁸ Shalihah, “Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU”, 78.

kerakyatan di Indonesia, dengan menekankan bahwa keberhasilan demokrasi ekonomi yang efektif bergantung pada adanya demokrasi politik. Peneliti menjelaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia menggabungkan elemen kapitalisme dan ekonomi terpusat, namun lebih menekankan pada pentingnya sistem ekonomi kerakyatan yang mengutamakan keadilan sosial dan perlindungan bagi kelompok yang rentan. Penelitian ini juga menguraikan ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila dan peran negara dalam mengatur ekonomi untuk mencapai kemakmuran rakyat, serta menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam distribusi pendapatan, tantangan seperti kemiskinan masih ada.¹⁹

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai demokrasi ekonomi. Namun, perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian terdahulu lebih menekankan pada hubungan antara demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang sekarang mengarah pada konsep demokrasi ekonomi pemikiran Jimly Asshiddiqie.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Syaugi Mubarak Seff yang berjudul “Demokrasi Ekonomi Dalam Hukum Ekonomi Syari’ah” Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini membahas

¹⁹ Abbas, “Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan”, 432.

mengenai prinsip-prinsip sistem ekonomi Indonesia, menekankan integrasi nilai-nilai Pancasila dan hukum ekonomi Islam untuk mempromosikan demokrasi ekonomi, keadilan sosial, dan nilai-nilai moral. Penelitian ini mengkritisi kebijakan ekonomi konvensional yang mengutamakan individualisme dan menyoroiti pentingnya pendekatan partisipatif terhadap pembangunan ekonomi, mengadvokasi sistem yang menyeimbangkan standar etika dengan pertumbuhan ekonomi. Pembahasannya mencakup peran keuangan Islam, khususnya dalam membina kemitraan dan melarang praktik-praktik yang tidak adil, sekaligus membahas konteks historis krisis ekonomi di Indonesia dan perlunya reformasi menuju kerangka ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.²⁰

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas topik mengenai demokrasi ekonomi. Adapun perbedaan antara keduanya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian sebelumnya lebih mengarah pada demokrasi ekonomi syariah, yang menekankan pada integrasi nilai-nilai dan institusi-institusi seperti pasar, keluarga, masyarakat, dan negara untuk memastikan tercapainya falah atau kesejahteraan bagi semua. Sementara itu, penelitian sekarang lebih fokus pada pemikiran Jimly Asshiddiqie terkait konsep demokrasi ekonomi.

²⁰ Syaugi Mubarak Seff, "Demokrasi Ekonomi Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah", *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, 2. (Desember 2010), 93.

d. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Ardianti yang berjudul “Pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang demokrasi dalam prespektif fiqh siyasah” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Lampung. Penelitian ini membahas mengenai pemikiran Jimly Asshiddiqie yang menganjurkan demokrasi yang berakar pada hukum ketatanegaraan, dengan menyoroti pentingnya lembaga-lembaga yang kuat, keadilan, hak asasi manusia, dan mekanisme partisipatif seperti pemilihan umum dan referendum. Pembahasan ini juga mencakup hubungan antara Islam dan demokrasi, dengan mencatat bahwa pandangan-pandangan berkisar dari menganggapnya tidak sesuai hingga mengakui potensi harmoni melalui prinsip-prinsip seperti musyawarah. Selain itu, prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak minoritas diperiksa bersama dengan berbagai model demokrasi dan kesesuaiannya dengan ajaran-ajaran Islam, yang menggambarkan keragaman interpretasi dan implementasi di berbagai konteks.²¹

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengenai pemikiran Jimly Asshiddiqie. Namun, perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian terdahulu lebih menekankan pada demokrasi dalam perspektif fikih siyasah. Sedangkan penelitian yang sekarang mengarah pada konsep demokrasi ekonomi.

²¹ Evi Ardianti, “Pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang demokrasi dalam prespektif fiqh siyasah” Fakultas Syariah, Skripsi, (Lampung : Universitas Islam Negeri Lampung : 2017), 58.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami pembahasan ini secara umum dan komprehensif, peneliti berusaha menyajikan isi skripsi dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu sebagai berikut:

BAB I, bab ini memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan dan definisi istilah.

BAB II, Bab ini membahas tinjauan pustaka, yang berisi konsep-konsep yuridis sebagai dasar teori untuk menganalisis masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka ini juga mencakup pembahasan dan informasi yang relevan dengan topik penelitian yaitu tentang analisis pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang demokrasi ekonomi. Tujuan dari tinjauan teori ini adalah untuk dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat memaparkan gambaran singkat dengan beberapa kajian pustaka.

BAB III, Bab ini menyajikan pemaparan data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai demokrasi ekonomi. Data-data tersebut diperoleh melalui penelitian literatur, kemudian disusun, dikategorikan, diverifikasi, dan dianalisis untuk memberikan jawaban atas setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

BAB IV, Bab ini merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian, sementara saran berisi rekomendasi dan harapan peneliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

8. Definisi Operasional

Pada bagian ini, peneliti sedikit memberikan pemaparan mengenai beberapa istilah yang berkaitan erat dengan judul peneliti. Hal ini dilakukan guna agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran yang keliru terhadap judul peneliti. Sehingga, pemaparan dalam istilah-istilah yang dianggap penting harus dituangkan dalam hal ini. Berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Analisis

Analisis adalah proses pemeriksaan terhadap suatu peristiwa (seperti tulisan, tindakan, dan lainnya) untuk memahami kondisi yang sesungguhnya, termasuk sebab-akibat dan inti permasalahannya.²² Analisis adalah proses berpikir yang bertujuan untuk memecah suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian terkecil agar dapat memahami elemen-elemen, hubungan antar elemen, serta fungsi masing-masing dalam konteks yang lebih besar. Analisis juga bisa diartikan sebagai cara menyederhanakan suatu masalah agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Menurut Nana

²² Analisis, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> , diakses tanggal 2 Juni 2024.

Sudjana, "Analisis adalah upaya untuk memisahkan suatu kesatuan menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian agar struktur dan urutannya menjadi lebih jelas."²³

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah proses untuk mengidentifikasi temuan baru mengenai objek yang sedang diteliti atau diamati oleh peneliti dengan mencari bukti-bukti yang valid pada objek tersebut.

b. Pemikiran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemikiran adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dan digunakan sebagai pedoman yang berasal dari masyarakat sekitar.²⁴ Dari penjelasan ini, kita bisa memahami bahwa pemikiran adalah kemampuan individu untuk mengenali isu-isu, membuat dugaan yang dapat dijelaskan, serta mengidentifikasi hubungan penting untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dari informasi yang tersedia.

c. Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie adalah seorang pakar hukum tata negara Indonesia yang dikenal luas sebagai akademisi, mantan hakim konstitusi, dan intelektual publik. Ia menjadi tokoh penting dalam pendirian Mahkamah Konstitusi Indonesia pada tahun 2003 dan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama. Di bawah

²³Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 27.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Analisis", <https://kbbi.web.id/pemikiran> , diakses tanggal 2 Juni 2024.

kepemimpinannya, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hukum di Indonesia.

d. Konsep Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah bentuk kedaulatan rakyat terhadap perekonomian negara, yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi yang adil, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia yang sebesar-besarnya.²⁵

Dengan demikian, demokrasi ekonomi bukan hanya sebuah konsep teori, tetapi juga sebuah praktik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Tujuannya adalah untuk membangun sistem yang adil dan berkelanjutan, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

e. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang berarti berkaitan, memiliki hubungan, atau sesuai dengan.²⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi merujuk pada hubungan atau keterkaitan.²⁷

²⁵Seff, "Demokrasi Ekonomi Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah", 86.

²⁶Paus Apartando, kamus Populer, (surabaya : PT Arkola, 1994), 666.

²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Relevansi", <https://kbbi.web.id/relevansi> , diakses tanggal 17 Februari 2025.

f. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan total pendapatan dan pendapatan per kapita, dengan memperhitungkan pertumbuhan jumlah penduduk, dan disertai perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara dan distribusi pendapatan yang merata di kalangan penduduk. Pembangunan ekonomi tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempermudah pelaksanaan pembangunan ekonomi.²⁸

²⁸ Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia*, (Depok : Rajawali Press, 2020), 42.